PENDIDIKAN

VERSI WEBOMETRICS

UGM Terbaik di Indonesia

JAKARTA (KR) - Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi perguruan tinggi (PT) terbaik di Indonesia versi Webometrics. Sedangkan di tingkat dunia, UGM menempati peringkat 810.

"Alhamdulillah pada pemeringkatan Webometrics yang dirilis Januari 2021, UGM menempati peringkat 1 di Indonesia dan peringkat 810 dunia. Posisi ini merupakan hasil dari perbaikan di segala bidang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh UGM," tutur Rektor UGM, Panut Mulyono, baru-baru ini di Jakarta.

Menyusul setelah UGM dalam daftar PT di Indonesia adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) di peringkat 1.088 dunia dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di peringkat 1.089. Selanjutnya Universitas Indonesia menempati posisi 1.315 dan Universitas Airlangga (Unair) di posisi 1.322.

"Semoga UGM menjadi universitas ru-

jukan dan dapat lebih berkontribusi bagi bangsa Indonesia dan masyarakat dunia,' ujar Panut.

Webometrics Ranking of World Universities sendiri diinisiasi Cybermetrics Lab. sebuah kelompok riset yang menjadi bagian dari Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas (CSIC), badan riset publik terbesar di Spanyol. Pemeringkatan itu sudah dilakukan sejak tahun 2004. Tujuannya untuk mempromosikan open access terhadap pengetahuan yang dihasilkan PT.

Pada tahun ini, terdapat 31 ribu PT di lebih dari 200 negara yang masuk dalam daftar pemeringkatan. "Peringkat yang diperoleh UGM ini setelah melalui penilaian yang dilakukan webometric terdiri tiga indikator yakni impact atau visibility, openness atau transparency serta excellence," terang Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi (DSSDI) UGM, Widyawan. (Ati)

PJJ, Masihkah Menjadi Alternatif?

KEINGINAN sebagian orangtua dan siswa yang menghendaki segera dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) belum juga terpenuhi. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi pilihan. Hal itu disebabkan, masih tingginya penularan virus Korona yang hingga saat ini belum

Muncul kekhawatiran bila PTM diizinkan bakal ada klister baru Covid-19, mengingat tingkat kerumunan di sekolah cukup tinggi. Kemendikbud pun yang semula sudah mengizinkan sekolah untuk membuka PTM dengan prosedur ketat sesuai protokol kesehatan, sepertinya memilih untuk menunda dan melanjutkan PJJ.

Hanya sebagian kecil saja yang sudah melaksanakan PTM dan kebanyakan dilakukan sekolah kejuruan yang memang mengharuskan praktik di laboratorium.

Setelah berlangsung selama satu semester, PJJ mengudang pro dan kontra. Pada awal pandemi, harus diakui, pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan tepat.

Mereka yang menganggap baik, PJJ menjadi alternatif di tengah wabah yang belum ada tanda-tanda bakal berakhir. Sedangkan, yang menilai kurang efektif, PJJ dianggap menjadikan perkembangan siswa dalam segala bidang lamban. Bahkan, pendapat terbaru PJJ bisa menimbulkan sikap cyber-

bullying (KR, Senin, 25/1/2021).

Sikap cyberbullying adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan dan mengejek orang lain. Sikap seperti itu bisa terjadi atau menjangkiti para siswa, karena penggunaan internet, gadget dan media sosial lainnya yang terlalu lama. Oleh karena itu, perlu menjadi pemikiran mendalam terhadap persoalan

Adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Dra Sri Wahyuningsih MPd yang melontarkan kekhawatiran tersebut. Artinya, rasa cemas itu disampaikan oleh orang 'dalam' sendiri yang mengamati pelaksanaan PJJ

Lantas apa yang harus dilakukan untuk menghindari sikap cyberbullying ini. Banyak saran dan masukan dikemukakan para ahli pendikan. Misalnya, guru harus berinovasi dalam memberikan materi, sehingga siswa tidak mudah bosan.

Kini muncul metode Project Based Learning (model pembelajaran berbasis proyek) yang konon bisa menjadi solusi untuk diterapkan dalam PJJ. Metode ini dinilai mampu melatih kreativitas siswa dan secara langsung melatih sisi literasi, numerasi dan bahasa pada anak. (M Sobirin)

GURU PERLU DIPERSIAPKAN SEJAK DI LPTK

Peta Jalan Pendidikan Belum Sesuai Harapan

YOGYA (KR) - Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang disusun belum seperti yang diharapkan. Salah satunya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Untuk itu, alangkah baiknya apabila PJP mempersiapkan guru sejak mereka masih mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan begitu, lulusan yang dihasilkan tidak sekadar profesional dan kompeten, tapi juga benar-benar siap dalam menghadapi berbagai persoalan dalam dunia pendidikan.

"Peta Jalan Pendidikan atau *road* map perjalanan pendidikan Indonesia hingga tahun 2035 sudah jelas ada, meski sifatnya masih awal, sehingga bisa diketahui dalam melangkah dimulai dari apa dan berakhir hasilnya seperti apa," kata Mantan Ketua PGRI DIY, Ahmad Zainal Fanani SPd MA, Minggu (31/1).

Diakui Zainal, untuk bisa mewujudkan beberapa hal yang ada dalam PJP membutuhkan proses. Meski begitu, pihaknya optimis dengan keseriusan dan komitmen bersama bisa diwujudkan. Aplikasi dari PJP, ujarnya, bisa dimulai dari guru, setelah itu ditindaklanjuti dengan perubahan kurikulum. Tentunya dalam melakukan sejumlah perubahan tidak boleh mengabaikan lembaga pencetak guru yaitu LPTK. Hal itu dimaksudkan, supaya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus terus dilakukan. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak mudah dan membutuhkan proses.

"Meningkatkan kompetensi guru yang sudah bekerja tidak semudah, termasuk mendidik calon guru. Karena guru yang sudah terjun di lapangan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya lingkungan

kerja maupun kesejahteraan, jadi halhal tersebut yang harus diperbaiki dulu. Untuk itu, perlu diadakan penataran guru, dari sisi Iptek, pedagogik, pengembangan kurikulum serta fasilitas guru," paparnya.

Menurut Zainal Fanani, keberadaan 100 ribu guru penggerak sebagai pool kepala sekolah rasanya tidak akan bisa terhubung baik. Karena kepala sekolah itu pemimpin dan manajer, sehingga harus dididik sendiri. Walaupun sebetulnya kepala sekolah itu kariernya dari guru menjadi wakil kepala sekolah baru kepala sekolah, jadi semuanya membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Ia menilai, untuk membangun SDM peserta didik harus dimulai dari membangun SDM guru. Silakan kurikulum diubah, tetapi yang menjalankan kurikulum di lapangan juga guru, jika ingin menjadi manusia yang berkarakter serta berpancasila tak hanya kurikulum yang diubah, namun juga kegiatan sekolah yang membentuk kepribadian siswa sesuai yang diinginkan.

Pandemi Ubah Pola Suplai dan Akses Makanan

SEMARANG (KR) - Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Dian Armanda menyatakan, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah pola food supply (suplai makanan) dan food access (akses makanan) dunia, termasuk Indonesia. Hal itu terkait dengan adanya pembatasan ekspor, permudah impor serta memacu produksi lokal sayuran dan buah.

Kandidat doktor dari Institute of Environmental Science Leiden University Belanda ini memaparkan, peran tanah sehat dalam Webinar Urban Farming Series III bertajuk "Optimal-



Dosen UIN Walisongo Semarang Dian Armanda (kiri), sedang berkebun.

kan Tanah Sehat dan Pupuk Dian menjelaskan, tanah Organik: Modal Urban Farming Alami" di Semarang, Sabtu (30/1) malam.

Dalam webinar yang diselenggarakan Citigrower itu,

sehat menyediakan rumah ideal bagi mikrobia dan organisme lain di tanah. Selain itu, tanah subur mengandung mikrobia yang mampu menyerap karbon di atmosfer (di udara) penyebab global warming, mengembalikan karbon-karbon ke tanah.

Ia menyebutkan tanah bisa menyimpan setidaknya (4.000 gigaton) lebih banyak karbon daripada atmosfer dan seluruh tanaman yang tumbuh di permukaan tanah (1.700 gigaton). Menyinggung bumi makin panas, Dian mengatakan, hal itu akibat gas rumah kaca hasil buangan berbagai kegiatan manusia, termasuk kegiatan pertanian dan kehutanan yang menyumbang 24 persen gas rumah kaca penyebab pemanasan (Ant)

EKONOMI

Laba BNI Hanya Rp 3,3 T

JAKARTA (KR) - Laba Bank Negara Indonesia (BNI) selama tahun 2020 sebesar Rp 3,3 triliun, atau turun tajam bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu yang mencapai Rp 15,38 triliun. Sementara rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio berada pada level 182,4 persen lebih besar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 133,5 persen.

"BNI terus beradaptasi di tengah masa pemulihan dari pandemi Covid-19 dan terus berupaya menumbuhkan bisnis, terutama pada triwulan terakhir tahun 2020, dengan fokus pada penguatan fundamental BNI. Hasilnya cukup memuaskan. Dengan program transformasi yang dilakukan, kami yakin bahwa kinerja BNI tahun 2021 jauh akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020," kata Dirut BNI Royke Tumilaar pada paparan kinerja BNI kuartal IV tahun 2020 di Jakarta, Jumat (29/1).

Dikatakan, untuk penyaluran kredit selama tahun 2020 sebesar Rp 586.2 triliun atau tumbuh 5.3 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, penyaluran kredit di segmen korporasi meningkat 7,4 persen menjadi Rp 309,7 triliun. Sementara itu, pertumbuhan kredit kepada segmen bisnis kecil masih sustain sebesar 12,3 persen menjadi Rp 84,8 triliun. "Demikian juga kredit konsumer yang masih tumbuh 4,7 persen menjadi Rp 89,9 triliun pada akhir tahun lalu. Pertumbuhan kredit segmen kecil terutama disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), adapun kredit konsumer sebagian besar tersalurkan dalam bentuk kredit pemilikan rumah dan payroll loan," kata Royke.

PAJAK PULSA HINGGA TOKEN SUDAH BERLAKU LAMA

PMK 6 Tahun 2021 Tidak Pengaruhi Harga di Masyarakat

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani In- mah tangga dengan daya di atas PPN dikenakan atas imbala drawati sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher yang berlaku mulai 1 Februari 2021. Pengenaan PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher tersebut sebenarnya sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ada istilah 'negative list'. Istilah ini berarti daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Sederhananya, semua barang atau jasa yang diperjualbelikan itu kena PPN kecuali yang ada di dalam daftar tersebut.

"Pulsa, kartu perdana, token

dan voucher tidak ada di dalam 'negative list'. Artinya kesemuanya merupakan barang kena pajak dan kena PPN. Aturan ini sudah lama ada. Harga yang kita bayarkan selama ini sudah termasuk PPN di dalamnya," ujar Hestu Yoga dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).

Hestu Yoga mengungkapkan, kecuali untuk listrik karena merupakan barang kena pajak tertentu bersifat strategis dan dalam batas tertentu tidak dikenakan PPN. Listrik untuk konsumsi ru-

6.600 watt baru dikenakan PPN, jika kurang dari itu tidak kena PPN. Begitu pula pembelian token listrik dari distributor token, tidak ada PPN yang dipungut di sana. Distributor token hanya memungut 'fee' atau biaya administrasi dari masyarakat dan harus membayar PPN kepada negara sebesar 10 persen sehingga masyarakat tidak membayar PPN sama sekali atas token yang dibelinya.

"Dalam bisnis penjualan pulsa dan kartu perdana, ada banyak distributor di antara operator telekomunikasi seluler dan masvarakat konsumen akhir. PMK ini menyederhanakan pemungutan PPN dalam penjualan pulsa dan kartu perdana, sehingga jelas tidak ada jenis dan objek pajak baru, konsumen juga tak mengeluarkan tambahan uang saat membeli keduanya," tegasnya.

Pemungutan PPN atas voucher juga hampir sama dengan token. atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucher dari penyelenggara voucher. Penerbitan PMK terbaru ini justru memangkas pajak berganda, supaya masyarakat tidak bayar PPN dua kali. Perlu diingat, ada kewajiban pemungutan PPN atas produk digital oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada tahun lalu. Supaya tidak kena pajak berganda maka PMK ini keluar.

"PPN dikenakan atas jasa pemasaran voucher itu berupa komisi atau imbalan atau 'fee' yang diterima distributor voucher, bukan atas nilai vouchernya. Voucher di sini diperlakukan sebagai alat pembayaran, sama dengan uang yang memang tidak terutang PPN. Begitulah adanya PMK ini. Kita perlu membaca dengan saksama peraturan tersebut dan tidak bisa menyimpulkan terburu-buru hanya dari judul PMK itu saja," pungkas Hestu.

MILIKI POTENSI CUKUP BESAR

Pemanfaatan Produk Pangan Lokal Ditingkatkan

YOGYA (KR) - Pemda DIY tidak henti-hentinya mensosialisasikan amanat pemanfaatan produk pangan lokal di DIY guna menjaga ketahanan pangan. Sebab DIY mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan produksi produk lokal, khususnya bahan pangan supaya bisa menekan ketergantungan impor bahan pangan yang masih tinggi hingga saat ini.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian baik DIY maupun yang ada di kabupaten perihal pemanfaatan produk lokal tersebut. Sepanjang kapasitas produksinya ditingkatkan dan kualitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi, apakah masyarakat atau konsumen mau mema-



Pengemasan gula pasir di Gudang Bulog Kalasan.

kai produk lokal atau import minded?" kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti kepada KR, Minggu (31/1).

Made mengungkapkan, masyarakat memang sudah telanjur terbiasa dengan

membeli produk-produk luar selama ini. Namun hal tersebut bisa diubah dan diarahkan untuk membeli produk lokal. Perihal harga produk lokal yang biasanya justru lebih tinggi daripada produk luar, bisa dikompromikan nantinya. Sebab masyarakat terkadang kurang menghargai produk lokal karena harganya sedikit lebih mahal, padahal kualitasnya justru lebih baik.

SementaraWakil Ketua TPID DIY Hilman Tisnawan mengatakan, dengan sistem informasi pangan di DIY tersebut sangat penting terutama guna menyoroti komoditas pangan yang fluktuatif penyumbang 'volatile food'. Dengan sistem informasi ini dapat diketahui produksi pangan, stok, distribusi dan sebagainya sehingga dapat diketahui neraca pangan baik surplus maupun defisit.

"Dengan adanya pendataan pangan dari hulu ke hilir ini dapat diketahui neraca pangan yang ada di DIY, apa perlu mendatangkan pasokan pangan dari daerah lain," imbuhnya. (Ira)

Ada Koperasi Hanya untuk Kepantasan

YOGYA (KR) - Ada koperasi yang hanya untuk kepantasan atau wangunwangun, sebagai pelengkap saja. Sebuah lembaga mendirikan koperasi hanya berdasar pada lebih pantas ada koperasinya. Tetapi kemudian dibiarkan begitu sa-

ja, tidak berkembang. Hal ini disampaikan Penasihat Koperasi Karyawan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (Kopkar MLPTs) 'Sejahtera' Ki Prof Drs Pardimin MPd PhD pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2020 di Komplek Pendapa Tamansiswa Yogyakarta, Sabtu (30/1).

Plt Ketua Harian MLPTs ini juga mendorong Kopkar MLPTs 'Sejahtera' mengikuti perkembangan zaman. "Sekarang era digital hendaknya memanfaatkan kemajuan tekologi tersebut. Dalam memberikan pelayanan, anggota tidak harus datang di koperasi. Bisa dilakukan oleh tenaga koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain," ujarnya.

Sedangkan Ketua Kopkar MLPTs 'Sejahtera' Ki Tuju Marjono menyebutkan, ada penurunan dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Buku 2020,

dibanding tahun sebelumnya. Unit Simpan Pinjam Tahun Buku 2019 mencapai Rp 63.117.400, Tahun Buku 2020 perolehannya Rp 39 234.326 atau turun Rp 23.883.074. Unit UKM Mart Tamansiswa Tahun Buku memperoleh 2019 309.102.465,53. Buku 2020 memperoleh Rp 156.280.132,00 atau turun Rp 153.822.333,53.



Suasana RAT Kopkar MLPTs 'Sejahtera'.